



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PASURUAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADI WIBOWO**
2. Jabatan : **WAKIL WALIKOTA**
3. NHK : **759797**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.889.948.000

1. Tanah Seluas 1594 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 239.100.000
2. Tanah Seluas 1408 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 211.200.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1672 m2/200 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 668.800.000
4. Tanah Seluas 1540 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 616.000.000
5. Tanah Seluas 890 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 359.000.000
6. Tanah Seluas 2058 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 205.800.000
7. Tanah Seluas 1016 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 130.048.000
8. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 480.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 76.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F7 QQRS-TX MT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. LAINNYA, POLYGON MOUNTAIN BIKE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
4. LAINNYA, EXOTIC MOUNTAIN BIKE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	150.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.132.448.000
III. HUTANG	Rp.	25.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.107.448.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.